



## **Nilai-nilai Konfusianisme dan Stagnasi Perkembangan Gerakan Feminisme di Korea Selatan**

Siti Sarah Humairah

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: siti21029@mail.unpad.ac.id

Anggia Utami Dewi

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: anggia.utami@unpad.ac.id

| Submit: 25-03-2024 | Accept: 30-09-2024 | Publish: 31-01-2025 |

### **Keywords**

*Confucianism, Feminism, South Korea*

### **ABSTRACT**

*The research explores Confucianism's impact on the stagnation of the feminist movement in South Korea. It utilizes a qualitative descriptive methodology, involving data collection through document analysis, and literature review to gain a detailed understanding of the feminist movement in the country. The study also examines the long-term effects of Confucian values on gender roles and family dynamics, along with the impact of South Korea's geopolitics, particularly its relations with North Korea, on the feminist movement. Additionally, the research reviews the progress of the feminist movement in South Korea and the public's reaction to it. The research findings demonstrate a connection between Confucian values in South Korea and the slow advancement of the feminist movement there.*

### **Kata Kunci**

Feminisme, Konfusianisme, Korea Selatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Konfusianisme terhadap stagnasi gerakan feminis di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman rinci tentang gerakan feminis di negara tersebut. Penelitian ini juga mengkaji dampak jangka panjang nilai-nilai Konfusianisme terhadap peran gender dan dinamika keluarga, serta dampak geopolitik Korea Selatan, khususnya hubungannya dengan Korea Utara, terhadap perkembangan gerakan feminis di negara tersebut. Kemudian, penelitian ini juga mengulas tentang perkembangan gerakan feminisme di Korea Selatan dan reaksi masyarakat terhadap pergerakan tersebut. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara nilai-nilai Konfusianisme di Korea Selatan terhadap lambatnya kemajuan gerakan feminisme di sana.

## **PENDAHULUAN**

Korea Selatan saat ini telah berkembang jauh dalam sektor ekonomi, teknologi, dan juga industri. Sebagai salah satu negara di Asia Timur yang berbatasan dengan negara-negara seperti Korea Utara dan Jepang, Korea Selatan telah banyak melalui berbagai fase krisis, perang, dan masa penjajahan. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah mengalami transformasi luar biasa dari negara yang sebelumnya miskin menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pengalaman Korea Selatan memberikan pelajaran bagi negara-negara berkembang tentang bagaimana bertransisi ke ekonomi berbasis pengetahuan yang dinamis, serta peningkatan penyediaan infrastruktur dan layanan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan (WorldBank, 2024). Di samping pencapaian yang diraih oleh negara ini, para perempuan tetap harus berjuang menghadapi situasi misoginis yang mereka dapatkan dalam ruang publik, serta pelecehan seksual yang masih merajalela. Industri teknologi yang berkembang pesat nyatanya telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan seksual digital. Perempuan sering kali direkam secara diam-diam oleh kamera tersembunyi kecil di toilet atau saat menggunakan ruang ganti, meningkatkan ancaman bagi para perempuan di ruang publik. Sejak tahun 2020, kejahatan seksual digital turut meningkat sebesar 82%, dan sampai tahun 2021 tercatat 11.568 kasus telah dilaporkan (Mackenzie, 2022).

Melansir dari portal berita BBC (2022), para pekerja perempuan dibayar rata-rata sepertiga lebih sedikit dibandingkan pekerja laki-laki. Data yang diambil dari UN Women juga mencatat bahwa per bulan Februari 2021, jumlah kursi parlemen yang diduduki oleh para perempuan hanya berjumlah 19%, jauh di bawah rata-rata global yang di angka 25%. Selain itu, perempuan yang berusia 15 tahun ke atas menghabiskan 14% dari waktu mereka melakukan pekerjaan perawatan dan domestik tanpa dibayar, dibandingkan dengan laki-laki yang hanya menghabiskan 4.4% dari waktu mereka. Degan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang masih sangat jauh, yaitu sebesar 31,1% pada tahun 2021, tidak mengherankan jika Korea Selatan di tahun yang sama menempati urutan ke-99 dari 146 negara dalam peringkat kesenjangan gender dengan skor 0,689. Saat ini, hukum di Korea mungkin memberikan peluang dan status yang setara bagi perempuan. Namun meskipun telah terjadi perubahan, pandangan mengenai peran gender tetap ada, di mana laki-laki sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan ringan dibandingkan perempuan. Banyak kasus pemerkosaan yang dibatalkan akibat dominasi pria dalam proses penuntutan. Di samping itu, diskriminasi gender dalam perekrutan pekerjaan masih sering terjadi, dengan perempuan menghadapi lebih banyak tantangan dan hambatan di pasar kerja akibat keyakinan tradisional yang menempatkan mereka dalam peran domestik. Walaupun mayoritas perempuan telah melanjutkan pendidikan ke universitas dan sering kali lulus dengan nilai yang baik, mereka cenderung tidak dipekerjakan dengan gaji yang lebih tinggi atau pada posisi yang sama dengan rekan laki-laki mereka. Banyak perusahaan lebih memilih merekrut laki-laki yang kurang berkualifikasi daripada berinvestasi pada perempuan yang mereka takutkan akan meninggalkan pekerjaan setelah menikah atau hamil. Mereka memiliki pemahaman bahwa perempuan akan memiliki lebih banyak tanggung jawab domestik dibandingkan laki-laki. Nilai-nilai kultural dan struktural Korea Selatan yang masih bersifat patriarki dan secara mendalam telah berakar di negara ini, membuat seluruh perempuan di Korea Selatan terjebak dalam peran berbasis gender di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi.

Secara kultural, kehidupan masyarakat Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme. Nilai Konfusianisme di Korea Selatan saat ini bahkan telah berkembang menjadi ideologi yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dan pemerintah masyarakat tersebut. Negara ini dikenal sebagai negara dengan penganut nilai-nilai Konfusianisme terbanyak, hingga mengalahkan

negara China yang merupakan negara asal dari ajaran Konfusianisme. Warisan budaya tersebut telah dirangkul erat sejak lama dan membentuk sistem moral, cara hidup, dan sebagian besar sistem hukum Korea Selatan. Jika ditinjau secara historis, Konfusianisme memainkan peran penting dalam membentuk peran gender dan dinamika keluarga dalam masyarakat Korea Selatan. Hal ini kemudian melanggengkan struktur Patriarki tradisional, di mana laki-laki memegang otoritas utama dan perempuan diharapkan memenuhi peran domestik. Pada saat Korea Selatan masih berupa kerajaan, hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk menempuh pendidikan, sedangkan kaum perempuan sebagian besar tidak diikutsertakan dalam pendidikan formal. Pengaruh Konfusianisme, yang menekankan peran gender tradisional dan struktur keluarga hierarkis, berkontribusi pada pengecualian perempuan dari kesempatan pendidikan. Pendidikan akhirnya dianggap tidak diperlukan bagi perempuan yang hanya akan mengerjakan peran-peran domestik.

Saat ini, Korea Selatan sedang mengalami feminisme gelombang kedua yang unik, di mana pembahasan mengenai kekerasan seksual dan keamanan perempuan di ruang publik difasilitasi oleh medium feminisme gelombang keempat, yakni internet. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme di negara Korea Selatan telah tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara-negara Barat yang secara substansi telah maju ke gelombang keempat, dengan isu-isu utama seputar interseksionalitas, kata ganti atau *pronouns*, serta keselamatan komunitas trans. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, faktanya Korea Selatan terus menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang telah menghambatnya untuk berprogres ke gelombang-gelombang gerakan feminisme berikutnya (Koeval, 2022; Tizzard, 2022). Ketimpangan gender di Korea Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di antaranya adalah dampak nilai-nilai Konfusianisme terhadap norma-norma sosial negara tersebut dan peran geopolitik Korea Selatan, khususnya hubungannya dengan Korea Utara.

Pemahaman terhadap konteks sejarah, budaya dan politik Korea Selatan ini penting dalam rangka menelaah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminis dan perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan gender di negara tersebut (Koeval, 2022). Berdasarkan latar belakang ini, tulisan ini akan menganalisis bagaimana nilai-nilai Konfusianisme berkontribusi terhadap berlanjutnya ketidaksetaraan gender di masyarakat Korea Selatan serta bagaimana nilai tersebut menghambat kemajuan gerakan feminis di negara tersebut. Tulisan ini juga menganalisis faktor-faktor lain yang menghambat pergerakan feminis di Korea Selatan, seperti faktor geopolitik.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Feminisme**

Feminisme secara umum merupakan istilah luas yang mencakup karya para akademisi yang berupaya membawa keprihatinan gender di berbagai bidang, termasuk hubungan internasional. Teori feminis dalam hubungan internasional bertujuan untuk menarik perhatian pada pengalaman, ide, dan aktivitas perempuan, dan mencakup konsep-konsep seperti gender dan identitas gender, mengevaluasi struktur sosial yang terkait dengan gender di semua lapisan (Ali, 2023). Teori feminis berusaha untuk menentang teori hubungan internasional tradisional, seperti realisme dan liberalisme, dengan memasukkan perspektif baru terkait gender dan patriarki (True, 2010). Ia berupaya untuk memahami relasi gender yang ada, dominasi maskulinitas terhadap feminitas, dan konstruksi identitas gender dalam bidang hubungan internasional. Para ahli teori feminis maka telah memanfaatkan pengalaman masyarakat yang terpinggirkan dan tertindas, termasuk perempuan, untuk menantang dan merevisi landasan epistemologi dan ontologi dari bidang tersebut (True, 2010).

Adapun teori feminis dalam hubungan internasional memiliki beberapa aspek utama, yaitu: (i) gender dan patriarki; (ii) partisipasi perempuan; (iii) dekonstruksi gender; dan (iv) interseksionalitas. Pertama, teori feminis mengkaji konstruksi gender dan dominasi maskulinitas atas femininitas untuk memahami bagaimana gender dan patriarki membentuk konsep inti hubungan internasional, seperti negara, kedaulatan, kekuasaan, dan keamanan (True, 2010). Kedua, teori feminis menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan asumsi ketidakhadiran mereka dalam teori dan praktik hubungan internasional tradisional (Smith, 2018). Ketiga, teori feminis berusaha untuk mengkonstruksi ulang konsep gender, menantang asumsi konsep 'perempuan' yang homogen dalam hubungan internasional dan mengungkap logika gender sebagai sesuatu yang melekat di lapangan (Smith, 2018). Keempat, teori feminis menekankan persinggungan gender dengan kategori sosial lainnya, seperti ras, kelas, dan seksualitas, untuk lebih memahami pengalaman perempuan dan tantangan yang mereka hadapi di bidang hubungan internasional (Ali, 2023).

Dengan demikian, teori feminis dalam hubungan internasional menawarkan perspektif gender dalam politik global, menantang teori dan praktik tradisional di lapangan, serta menggabungkan perspektif baru terkait gender dan patriarki. Hal ini bertujuan untuk memahami konstruksi gender dan dominasi maskulinitas terhadap femininitas dalam hubungan internasional, serta pengalaman perempuan dan tantangan yang mereka hadapi baik di ranah domestik maupun publik.

### **Gerakan Feminisme**

Gerakan feminis sering kali dibagi menjadi empat gelombang, yang masing-masing mempunyai ciri khas fokus dan konteks sejarahnya yang berbeda. Gelombang feminisme pertama muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan fokus pada hak pilih dan hak hukum perempuan. Gelombang ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Amandemen ke-19 di Amerika Serikat, yang memberikan perempuan hak untuk memilih (Rampton, 2022). Selanjutnya, feminisme gelombang kedua terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, yang mengangkat berbagai isu, termasuk diskriminasi gender di tempat kerja, hak-hak reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Gelombang ini ditandai dengan aktivisme sosial dan politik yang signifikan, yang mengarah pada pengesahan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender (Rampton, 2022).

Gelombang ketiga feminisme muncul pada tahun 1990an dan ditandai dengan fokus pada upaya mendekonstruksi gagasan tentang kewanitaan, gender, kecantikan, seksualitas, femininitas, dan maskulinitas. Gelombang ini berupaya mengatasi keterbatasan gelombang kedua dan merangkul kompleksitas gender, ras, seksualitas, dan kelas sebagai cikal bakal lahirnya gagasan mengenai interseksionalitas yang akan diangkat pada gelombang keempat (Lesso, 2023). Berikutnya, gelombang keempat feminisme dianggap oleh sebagian orang sebagai kelanjutan dari gelombang ketiga, yang ditandai dengan bangkitnya aktivisme media sosial dan fokus baru pada isu-isu seperti pemberdayaan wanita, feminisme siber (*cyberfeminism*), dan interseksionalitas. Gerakan #MeToo, yang mendapat momentum pada tahun 2017, sering disebut-sebut sebagai salah satu aspek penting dari gelombang keempat karena gerakan ini menarik perhatian luas terhadap prevalensi pelanggaran seksual dan perlunya perubahan sistemik (Lesso, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa konsep "gelombang" dalam feminisme adalah metafora yang berguna untuk secara sederhana memberikan periodisasi terhadap setiap tahap dalam perkembangan feminisme. Namun, bentuk periodisasi ini tidaklah sempurna karena dapat menyederhanakan sifat gerakan feminis yang kompleks dan beragam. Selain itu, tidak semua cendekiawan dan aktivis sepakat mengenai batasan spesifik dari masing-masing gelombang, dan beberapa berpendapat bahwa feminisme harus dipandang

sebagai perjuangan yang terus-menerus dan terus berkembang demi kesetaraan gender, dan bukan sebagai serangkaian periode sejarah yang berbeda (Grady, 2018). Hal ini maka sejalan dengan bagaimana keempat gelombang feminisme, yang dipahami dalam konteks Barat, tidak mudah untuk diterapkan pada situasi yang dialami oleh Korea Selatan karena negara tersebut memiliki berbagai faktor historis dan kultural tersendiri yang berbeda dengan negara-negara Barat pada umumnya.

### **Konfusianisme**

Konfusianisme adalah sistem filsafat sosial dan etika yang berasal dari China kuno dan telah dianut oleh masyarakat China selama lebih dari dua ribu tahun (Weiming, 2023). Konfusianisme sering kali dikarakteristikan sebagai sebuah filsafat daripada sebuah agama, meskipun mempunyai unsur keagamaan dan telah mempengaruhi praktik keagamaan di Asia Timur. Pada dasarnya, Konfusianisme berkaitan dengan kebajikan batin, moralitas, dan rasa hormat terhadap komunitas dan nilai-nilainya. Selanjutnya, Konfusianisme juga menekankan pentingnya keharmonisan sosial, hubungan hierarki, dan pentingnya kesalehan keluarga dan anak (Berling, 2023). Secara historis, hal ini memainkan peran penting dalam membentuk peran gender dan dinamika keluarga di masyarakat Asia Timur, termasuk Korea Selatan (Sleziak, 2013). Konfusianisme telah melanggengkan struktur patriarki tradisional, di mana laki-laki memegang otoritas utama dan perempuan diharapkan memenuhi peran domestik.

Adapun Konfusianisme memiliki pengaruh terhadap struktur politik dan sosial di Asia Timur, termasuk pola pemerintahan, masyarakat, pendidikan, dan bahkan keluarga pada tingkat yang paling rendah. Nilai-nilai etika Konfusianisme telah menjadi sumber inspirasi bagi komunitas dan bangsa di dunia Sinitik atau rumpun bahasa China dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam berbagai kasus, Konfusianisme telah menjadi ortodoksi pemerintah konservatif yang kemudian menjadi stimulus untuk pengadaan reformasi berkala yang berupaya untuk menghidupkan kembali dan memperbarui kekuatan moral, intelektual, serta spiritual dari tradisi Konfusianisme dengan dukungan populasi penganutnya yang besar (Weiming, 2023).

Dalam masyarakat kontemporer Korea Selatan, Konfusianisme terus mempengaruhi peran gender dan dinamika keluarga meskipun pengaruhnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu (Sleziak, 2013). Masih adanya ketidaksetaraan gender di Korea Selatan menunjukkan pengaruh nilai-nilai Konfusianisme dan tradisi budaya yang terus menindas hak-hak dan kebebasan perempuan (Weiming, 2023). Namun, gerakan feminis kontemporer di Korea Selatan tengah berupaya untuk menantang norma gender tradisional dan memberdayakan perempuan untuk menegaskan hak dan kebebasan mereka dalam menghadapi kendala budaya dan sosial, yang secara tidak langsung menentang nilai-nilai Konfusianisme yang mewariskan budaya patriarki di negara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Konfusianisme adalah sistem filsafat sosial dan etika yang berperan penting dalam membentuk peran gender, dinamika keluarga, serta struktur politik dan sosial di Asia Timur, tidak terkecuali Korea Selatan.

### **Neo-Konfusianisme dan Konstitusi Korea Selatan**

Perkembangan dari Konfusianisme, yakni Neo-Konfusianisme, telah menjadi bagian penting dalam sejarah Korea Selatan dan perkembangan konstitusionalnya. Di Korea Selatan, Konfusianisme berkembang menjadi agama virtual, dengan Neo-Konfusianisme menjadi ideologi mayoritas yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah negara tersebut. Pengaruh ini dapat ditelusuri kembali ke Dinasti Chosun yang sangat dominan dan diterima sebagai ideologi di semenanjung Korea (Kim, 2015; MUCH, 2023). Beberapa ahli berpendapat bahwa Neo-Konfusianisme adalah ideologi yang digunakan

untuk memecahkan masalah distribusi sumber daya sosial dalam sejarah Korea (Cho, 2018). Adapun dalam Neo-Konfusianisme terdapat penekanan pada ritus leluhur dan harta silsilah yang ditanamkan ke dalam struktur sosial negara yang kemudian menjadikannya elemen penting dalam identitas bersama dan tradisi hukum dalam konstitusinya (Kim, 2020). Sebagai akibat dari pengaruh sejarah ini, ketika Korea Selatan mulai menganut konstitusionalisme pada awal abad ke-20, negara ini juga memasukkan aspek-aspek Neo-Konfusianisme ke dalam kerangka konstitusionalnya, yang mencerminkan pengaruh Konfusianisme yang mengakar dalam sejarah dan budaya negara tersebut.

Presiden Pemerintahan Sementara Republik Korea ke-2, Park Eun-sik (1859-1925), memainkan peran penting dalam mengadvokasi pendirian Konfusianisme sebagai agama yang diakui secara resmi di Korea. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Park Eun-sik adalah seorang intelektual terkemuka yang berupaya mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pengaruh Barat dan modernisasi di Korea (Chen, 2021). Park Eun-sik berpendapat bahwa Konfusianisme harus berpindah dari ranah politik ke ranah agama, dan politik harus dipusatkan pada pembelajaran baru. Ia menganjurkan penyebaran pembelajaran baru di kalangan masyarakat dan menekankan penerjemahan karya klasik Konfusianisme ke dalam bahasa Korea, sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas termasuk petani, pengrajin, pedagang, dan perempuan yang sebelumnya tidak mendapat pendidikan. Park Eun-sik sangat yakin bahwa masa depan bangsa terletak pada penyebaran ilmu-ilmu baru, dan pelestarian vitalitas nasional bertumpu pada pemeliharaan agama (Chen, 2021). Upaya dan advokasinya mencerminkan respons terhadap tantangan modernisasi dan kebutuhan untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi perubahan masyarakat yang cepat. Pengaruh Park Eun-sik berkontribusi pada wacana seputar peran Konfusianisme dalam masyarakat Korea dan potensi transformasinya untuk memenuhi tuntutan modernitas.

Adapun aspirasi Park Eun-sik dilanjutkan pada tahun 90-an oleh Sekolah Tinggi Konfusianisme Sungkyunkwan. Sekolah tinggi tersebut merupakan institusi akademis di Korea Selatan yang didedikasikan untuk studi dan praktik Konfusianisme (Chen, 2021). Institusi ini dianggap sebagai pembawa obor tradisi Konfusianisme di Korea modern dan telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana seputar Konfusianisme dalam masyarakat Korea kontemporer. Demikian Sekolah Tinggi Konfusianisme Sungkyunkwan telah senantiasa berusaha untuk mempertahankan makna keagamaan dengan secara rutin mendedikasikan ritual untuk menghormati Konfusius dan menanamkan nilai-nilai Konfusianisme kepada generasi mudanya. Kompleks Sungkyunkwan hingga saat ini berfungsi sebagai ruang suci yang mirip dengan Kuil Konfusius di Qufu, yang diyakini sebagai tempat kelahiran para tokoh Konfusianisme.

Di samping itu, sebagai agenda rutin, dua ritual utama yang didedikasikan untuk Konfusius (*Seokjeon Daeje*) telah diadakan terus menerus selama musim semi dan musim gugur, sejak masa Dinasti Joseon (Chen, 2021). Sekolah Tinggi Konfusianisme Sungkyunkwan juga telah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan tradisional Konfusianisme melalui pembelajaran klasik Konfusianisme dan mempraktikkan nilai-nilai Konfusianisme. Institusi ini memiliki ratusan *hyanggyo* (sekolah desa) yang tersebar di seluruh negeri yang berkomitmen tidak hanya untuk menerapkan kurikulum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga untuk mengembangkan pendidikan tradisional Konfusianisme (Chen, 2021).

Pada dasarnya, Konstitusi Republik Korea (*Daehanmingug heonbeop*), yang merupakan hukum dasar dan tertinggi negara, menopang masyarakat Korea, mengedepankan nilai-nilai universal, dan melindungi hak-hak masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Konfusianisme yang mempengaruhi sistem hukum dan politik modern Korea (Cho, 2018). Berkatnya, terdapat hubungan yang tidak dapat

dipisahkan antara Konfusianisme dan politik Korea yang telah melampaui tingkat teoretis atau retorik. Namun demikian, pengaruh Neo-Konfusianisme terhadap sistem hukum modern Korea Selatan tidak bersifat *direct* seperti halnya di masa lalu. Pada tahun 1894, terjadi perubahan signifikan dalam sejarah hukum Korea ketika sebagian besar yurisdiksi tradisional digantikan oleh yurisdiksi Barat yang menyebabkan menurunnya pengaruh Konfusianisme pada sistem hukum di semenanjung Korea akibat pengaruh kedatangan delegasi Jepang (Chen, 2021).

Dengan demikian, Neo-Konfusianisme terus mempengaruhi Korea Selatan modern dalam berbagai aspek. Dalam masyarakat kontemporer Korea Selatan, gagasan Konfusianisme, khususnya yang menganjurkan hierarki dan kepemimpinan moral, telah digunakan untuk mendukung birokrasi negara (Cho, 2018). Selain itu, beberapa ahli juga berpendapat bahwa Neo-Konfusianisme adalah ideologi yang digunakan untuk memecahkan masalah distribusi sumber daya sosial dalam sejarah Korea (MUCH, 2023).

## **METODE RISET**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait nilai-nilai konfusianisme dan stagnasi perkembangan gerakan feminisme di Korea Selatan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya melalui analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman suatu fenomena dengan mengkaji karakteristik dan mendeskripsikan prosesnya secara terperinci. Metode ini berguna untuk pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang diselidiki dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya (Creswell & Poth, 2017). Melalui alasan tersebut, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif deskriptif pada penelitian untuk mengeksplorasi dampak dari nilai-nilai Konfusianisme dan keadaan geopolitik Korea Selatan dan Korea Utara berkontribusi terhadap terhambatnya gerakan feminis di negara tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, analisis portal berita, portal resmi dari institusi pemerintah maupun organisasi internasional, dan analisis tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan rinci tentang fenomena stagnasi gerakan feminisme di Korea Selatan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang diperoleh (Creswell & Poth, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam dua sub-bab komprehensif yang akan memberikan analisis spesifik terkait penelitian ini. Pada sub-bab pertama, peneliti akan membahas secara lebih terperinci tentang beberapa faktor yang melanggengkan sistem patriarki di Korea Selatan, yaitu pengaruh nilai Konfusianisme dan keadaan politik negara mereka. Sub-bab selanjutnya, peneliti akan lebih menelisik tentang pergerakan feminis di Korea Selatan yang terhambat karena faktor-faktor tersebut dan arah pergerakan ke depannya.

### **Nilai Konfusianisme sebagai Penyebab Langgengnya Sistem Patriarki di Korea Selatan**

Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019, sebanyak 34,5% wanita muda Korea (usia 19-34) mendukung feminisme, dibandingkan dengan 38,7% pria muda Korea yang menentang (Ma et al., 2020). Baik dukungan maupun pantangan terhadap feminisme sangat kuat di kalangan generasi muda. Di balik kilauan industri hiburannya yang menarik perhatian publik di seluruh dunia, Korea Selatan

memiliki sisi gelap yang dipengaruhi oleh patriarki. Kejadian kekerasan terhadap perempuan, termasuk serangan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, pemerkosaan, dan pembunuhan, semakin sering terjadi. Pada bulan September 2022, seorang karyawan perempuan dari sistem kereta bawah tanah Seoul dipukuli sampai mati di toilet stasiun kereta bawah tanah oleh rekan kerja laki-laki yang telah mengintip dan mengancamnya selama tiga tahun (NBCNews, 2022). Kematian serupa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018, seorang mahasiswa ditemukan meninggal di toilet umum Stasiun Gangnam setelah ditikam berkali-kali oleh laki-laki yang tidak dikenalnya. Menurut kepolisian, alasan laki-laki tersebut melakukan pembunuhan adalah karena merasa selalu ditolak oleh perempuan dan merasa inferior terhadap mereka. Menurut Kantor Jaksa Agung Korea Selatan, 90 persen korban kejahatan kekerasan pada tahun 2019 adalah perempuan, meningkat secara signifikan dari 71 persen pada tahun 2000. Ditambah lagi, menurut Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga yang saat ini sudah dibubarkan oleh Presiden Yoon Seok-Yeol, hanya dua dari sepuluh perempuan yang merasa bahwa Korea Selatan aman dari kejahatan (TheKoreaTimes, 2021). Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi di negara anggota OECD, yang dapat menggolongkan Korea Selatan sebagai negara maju?

Sejarah dan akar dari budaya patriarki di Korea Selatan bermula sejak zaman kerajaan. Para akademisi, terutama para akademisi feminis, telah lama membahas bagaimana nilai-nilai konfusianisme yang dianut oleh masyarakat Korea Selatan berperan dalam melestarikan sistem patriarki. Nilai-nilai konfusianisme telah meresap dalam budaya tradisional Korea, yang ditandai oleh sistem kerajaan dengan kesadaran tinggi akan kelas sosial dan struktur keluarga. Posisi superior laki-laki atas perempuan dijunjung tinggi untuk menjaga keberlanjutan sistem tersebut. Oleh karena itu, perempuan sering mengalami segregasi dari laki-laki, terbatas di dalam rumah, dan diberi tanggung jawab domestik sesuai dengan peran gender yang diakui pada masa itu. Konsep harga diri dan kesetiaan seorang istri kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam konfusianisme, diimplementasikan dalam norma sosial dan hukum. Bahkan, perempuan yang menjadi janda di usia muda dianggap suci, dan mereka diberikan hadiah sebagai penghargaan. Pemahaman masyarakat Korea terhadap kewajiban dan larangan bagi perempuan sangat dipengaruhi oleh hukum yang melarang maupun menganjurkan sistem-sistem tersebut.

Heisook Kim (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Confucianism and Feminism in Korean Context* mengidentifikasi dua landasan filosofis konfusianisme yang mendasari pandangan ini. Pertama, konsep *li* (aturan kesopanan) bergantung pada *ren* (budi pekerti) dan berperan dalam membedakan antara orang berdasarkan hierarki, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Konfusianisme di negara-negara Asia Timur, termasuk Korea Selatan, memandang aturan kesopanan sebagai hukum yang menentukan norma dalam masyarakat. Kedua, konsep *ren* dalam Konfusianisme menegaskan adanya keluarga patriarki besar, di mana ayah dan anggota laki-laki memiliki status lebih tinggi daripada ibu, anggota yang lebih muda, dan anggota perempuan. Cinta yang berasal dari konsep *ren* diarahkan terlebih dahulu kepada ayah dan kakak laki-laki sebelum diperluas kepada orang lain. Etika yang berpusat pada keluarga dan hubungan ini telah lama mendiskriminasi perempuan, karena keluarga cenderung bersifat patriarki dan hubungan sosial diatur secara hierarkis melalui hubungan laki-laki. Moralitas dipandang sebagai pemenuhan tanggung jawab moral seseorang terhadap orang lain dalam hubungan tertentu, bukan sebagai keputusan otonom. Etika yang berfokus pada keluarga dan hubungan ini telah lama mendiskriminasi perempuan, sebab hubungan sosial ini diatur secara hierarkis melalui relasi antar laki-laki. Etika relasional antar laki-laki yang berlangsung di Korea Selatan ini menjadi salah satu penghalang terbesar bagi perempuan yang tertarik pada bidang bisnis atau politik (Heisook Kim, 2017).

Para anak laki-laki dibesarkan oleh keluarga mereka untuk melihat perempuan sebagai makhluk yang berbeda, di mana sering kali hanya sebagai calon ibu dari anak-anak mereka. Penanaman pemahaman peran gender tradisional pada anak-anak Korea Selatan sejak kecil ini membuat langgengnya sistem patriarki di masyarakat. Misalnya saja ajaran pepatah lama yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh duduk bersama dengan lawan jenis setelah mencapai usia tujuh tahun, yang menunjukkan betapa dalamnya norma-norma tersebut terinternalisasi dalam budaya. Orientasi maskulin dalam budaya Konfusianisme menyebabkan perempuan mengalami subordinasi moral terhadap laki-laki. Perempuan dianggap tidak memiliki otonomi moral karena mereka terikat pada peran yang sempit dalam struktur keluarga, seperti sebagai putri, istri, ibu, atau menantu. Subordinasi ini tercermin dalam konsep "tiga cara mengikuti" (三從之道) dalam masyarakat tradisional Korea, di mana perempuan diwajibkan untuk mengikuti ayah mereka, kemudian suami, dan terakhir anak laki-laki mereka sepanjang hidup mereka.

Dalam artikel lain yang ditulis oleh Eunkang Koh (2008), ia memperkenalkan sistem Hoju yang merupakan sistem pendaftaran keluarga di bawah Hukum Perdata. Semua anggota keluarga di Korea Selatan terdaftar di bawah hoju atau "kepala keluarga". Dalam sistem patriarkal Korea, anggota laki-laki umumnya menjadi hoju. Ketika seorang ayah meninggal, putra sulungnya mewarisi posisi kepala keluarga, sementara putra yang lebih muda biasanya membentuk keluarga terpisah setelah menikah. Putri menjadi anggota keluarga suami mereka setelah menikah, dan perempuan hanya mewarisi posisi kepala keluarga jika tidak ada laki-laki yang masih hidup. Sistem hoju ini sendiri dianggap sebagai bagian berharga dari tradisi asli Korea yang telah diwariskan sejak Dinasti Goryeo. Para konfusian berpendapat bahwa sistem ini harus dilestarikan karena merupakan bagian dari tradisi nasional yang berharga. Sedangkan para kaum feminis di Korea Selatan percaya bahwa sistem hoju ini mencerminkan patriarki yang dipengaruhi oleh Konfusianisme (Eunkang Koh, 2008).

Eunkang juga menjelaskan bahwa pertentangan antara filsuf feminis dan filsuf Konfusian telah berlangsung sejak lama sebelum gerakan penghapusan sistem hoju berlangsung. Dalam konferensi musim gugur di tahun 1998, Filsuf feminis Kim Heisook menyatakan bahwa Konfusianisme merupakan penghalang bagi kesetaraan gender dan percaya bahwa hak-hak perempuan harus diikutsertakan dalam etika Konfusian karena hak perempuan belum ada dalam Konfusianisme. Sementara filsuf Konfusian Lee Seok In menentang argumen tersebut dan menganggap bahwa gagasan mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan Gender didasarkan pada konsep individualitas Barat yang bukan merupakan bagian dari tradisi Korea. Konferensi berikutnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konfusian Korea pada 27 November 1999, berjudul "Pertemuan Konfusianisme dan Feminisme," memberikan kesempatan bagi akademisi dari kedua aliran untuk mendiskusikan kemungkinan koeksistensi. An Byeongju (2001), mewakili Konfusianisme, berpendapat bahwa Konfusianisme, yang secara historis dibentuk melalui reformasi, fleksibel dan bisa direvitalisasi oleh feminisme. Dukungan juga datang dari Lee Unsun dan Lee Sook-In. Namun, akademisi feminis seperti Huh Ra-Gum dan Go Gaphui tetap meragukan apakah Konfusianisme bisa berubah cukup untuk menerima feminisme, mengingat adanya diskriminasi gender yang masih kuat. Dengan demikian, konferensi-konferensi tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai Konfusianisme secara nyata berdampak terhadap sistem patriarki di Korea Selatan saat ini.

Lebih lanjut, bukan hanya nilai budaya yang diadopsi, tetapi juga faktor geopolitik antara Korea Selatan dan Korea Utara menambah faktor yang menjadi dasar permasalahan dari langgengnya patriarki di negara ini. Sejarah pemisahan antara Korea Selatan dan Korea Utara dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, ketika Korea masih menjadi koloni Jepang. Setelah kekalahan Jepang, Sekutu memutuskan untuk membagi Korea menjadi dua zona pendudukan, dengan Uni Soviet

menduduki utara dan Amerika Serikat menduduki selatan. Pemisahan ini semakin mengkrystal pada tahun 1948 ketika dua negara berdaulat terpisah secara resmi didirikan: Republik Korea di selatan dan Republik Rakyat Demokratik Korea di utara. Dengan adanya pemisahan ini, konflik menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun upaya reunifikasi sering dilakukan oleh Korea Selatan, namun hingga kini belum berhasil. Korea Utara, dengan pasukan militer yang besar dan kuat, serta pengembangan nuklir, menjadi potensi ancaman keamanan bagi Korea Selatan. Sebagai respons terhadap potensi ancaman ini, Korea Selatan akhirnya menerapkan wajib militer. Isu wajib militer di Korea Selatan telah lama menjadi pusat perselisihan antara kelompok feminis dan anti-feminis, terutama di kalangan kaum muda (Choo, 2020).

Sistem wajib militer cenderung memperkuat persepsi norma gender tradisional dengan menegaskan pandangan stereotip mengenai peran laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat, dan Korea Selatan sangat mencerminkan fenomena ini. Keterlibatan laki-laki dalam tugas-tugas militer sering kali dianggap sebagai pemenuhan tugas maskulinitas dan tanggung jawab pertahanan negara, sementara peran perempuan lebih sering terkait dengan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Sistem wajib militer dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap laki-laki untuk melaksanakan kewajiban militer mereka. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap wajib militer dapat dianggap sebagai ketidaktaatan terhadap norma maskulinitas, dan individu yang tidak melaksanakan wajib militer dapat menghadapi stigma sosial. Kesetaraan gender juga sering dimaknai sebagai kewajiban militer bagi perempuan, sebagaimana diungkapkan dalam survei yang dirilis oleh Korea Society Opinion Institute. Meskipun banyak responden menolak wajib militer bagi perempuan, mayoritas responden berusia 20 sampai 30 tahun menyetujui ide tersebut (Choi Su-Young, 2021).

Dengan nilai-nilai Konfusianisme yang mengalir di dalam darah mereka, ditambah dengan kondisi geopolitik Korea Selatan dan Korea Utara yang memunculkan adanya kewajiban militer bagi laki-laki, dapat dijelaskan bagaimana gerakan feminisme masih menjadi suatu hal yang enggan diterima oleh sebagian masyarakat Korea Selatan.

### **Terhambatnya Gerakan Feminisme di Korea Selatan**

Sejak kemerdekaan Korea Selatan dari penjajahan Jepang, seluruh gerakan dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Korea difokuskan pada prioritas utama mereka, yakni memperjuangkan demokrasi melawan rezim otoriter Park Chung-hee (1961-1979) dan Chun Doo-hwan (1980-1987). Menurut Kim Kyoung Hee (1998), gerakan feminisme perempuan di Korea Selatan pada tahun 1980 sangat berbeda dengan pergerakan feminisme kedua di negara-negara Barat. Ketika pergerakan feminisme kedua di Barat lebih menekankan pada pencarian otonomi dan pembebasan dari lingkungan patriarki, perempuan Korea Selatan pada periode tersebut masih berfokus menekankan isu demokrasi dan nasionalisme untuk terbebas dari rezim otoriter Park Chung-hee dan Chuu Doo-hwan. Isu-isu kesetaraan gender yang masih belum lumrah di masyarakat kebanyakan muncul terlambat dan terus terhambat karena menghadapi banyak tantangan struktural dan budaya.

Pada masa itu, kekerasan seksual dianggap sebagai topik tabu di masyarakat Korea, yang diharapkan dapat diselesaikan setelah mencapai demokrasi (Jung, 2014). Meskipun demikian, setelah Korea Selatan berhasil meraih demokrasi, pergerakan feminis perempuan yang dianggap lebih progresif mulai menjauh dari pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa kepentingan perempuan dan kesetaraan gender hanya bisa dicapai secara efektif oleh perempuan secara otonom melalui upaya organisasi yang bersatu. Dengan kondisi ini, dapat ditegaskan bahwa Korea Selatan memiliki awal yang berbeda dan tertinggal jauh dari negara-negara Barat. Meskipun telah terjadi pembentukan konstitusi baru yang

melarang diskriminasi terhadap hak-hak umum seperti akses edukasi, pekerjaan, dan pernikahan setelah berakhirnya Perang Korea, pergerakan perempuan pada awalnya terfokus pada perbaikan kehidupan wanita di kelas menengah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970an, sejumlah perempuan dari kelas menengah tersebut mulai mendukung dan berusaha menangani masalah-masalah diskriminasi perempuan yang lebih spesifik, seperti prostitusi, reformasi hukum pernikahan, dan hak-hak buruh pabrik perempuan untuk bertahan hidup.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswa perempuan di Kantor Polisi Chungriangri pada tahun 1984 menjadi peristiwa pertama yang dipublikasikan secara luas di Korea. Namun, polisi menangkap sejumlah mahasiswa perempuan yang melakukan protes di jalanan, mengintimidasi dan mengancam mereka untuk tidak mengikuti demonstrasi. Meskipun kampanye ini pada akhirnya tidak berhasil karena desakan dan ancaman dari pihak kepolisian, kasus ini menjadi katalisator untuk meningkatkan kesadaran publik tentang rezim yang terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan. Tidak terhitung banyaknya kasus kekerasan seksual di Korea Selatan, ditambah dengan tekanan dari pihak pemerintah dan masyarakat yang sering melakukan *victim blaming*, melahirkan kelompok pergerakan wanita bernama Korean Women's Association United (KWAU) pada tahun 1987 sebagai organisasi yang memayungi 23 organisasi perempuan progresif. Seiring berjalannya waktu, muncul banyak gerakan feminis yang menuntut kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi perempuan, terutama dalam menghadapi kekerasan seksual di tempat umum.

Salah satu gerakan feminis yang paling menonjol di Korea Selatan baru-baru ini adalah Gerakan 4B yang muncul pada tahun 2018 sebagai respons terhadap diskriminasi gender di seluruh lapisan masyarakat Korea Selatan (Teehan, 2023). Gerakan ini berusaha menantang norma-norma masyarakat yang mendukung ketidaksetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk menegaskan hak dan kebebasan mereka dalam menghadapi kendala budaya dan sosial. Gerakan ini mendapatkan daya tarik signifikan di kalangan perempuan muda di Korea Selatan yang semakin menolak peran dan ekspektasi gender tradisional (Sussman, 2023).

Namun, pada kenyataannya, kemunculan gerakan feminis ini membuat beberapa laki-laki di masyarakat Korea Selatan merasa terancam dan tertekan, bahkan menyebabkan mereka mencoba berbagai cara untuk meredam suara gerakan ini. Hal ini pun mendorong munculnya gerakan anti-feminisme di Korea Selatan yang pada akhirnya semakin mempersulit upaya memajukan kesetaraan gender dan gerakan feminis di negara tersebut. Sejumlah peristiwa semakin memperkuat posisi kelompok anti-feminis, seperti kasus pemukulan seorang perempuan di toko serba ada oleh seorang laki-laki berusia 20 tahun, hanya karena perempuan tersebut memiliki gaya rambut yang pendek (TheKoreaHerald). Salah satu hal yang mendasari pergerakan kelompok anti-feminis ini adalah kesalahpahaman mereka mengenai konsep feminis itu sendiri.

Menurut survei yang dilakukan oleh Chun dan Jeong pada tahun 2019, hampir 60% laki-laki Korea dalam usia 20-an sangat setuju bahwa feminisme adalah paham ekstrimis yang menganut supremasi perempuan. Banyak laki-laki muda merasa bahwa kondisi sosial saat ini tidak mendukung pria dalam berbagai aspek, termasuk dalam hubungan, pernikahan, pekerjaan, promosi, dan penegakan hukum, terutama dalam kasus kejahatan seksual. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sekitar seperempat pria dalam usia 20-an mengidentifikasi diri mereka sebagai "pejuang anti-femme," dengan anti-feminisme sebagai identitas inti mereka. Selain itu, suara dan eksistensi kebencian dari kelompok anti-feminis juga semakin diperkuat dengan terpilihnya Presiden Yoon Suk-yeol, yang berkampanye dengan platform anti-feminis. Dalam pemilihan presiden 2022, Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat yang berhaluan kanan menang dengan kampanye yang menyalahkan perempuan atas tantangan sosial seperti

rendahnya angka kelahiran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan penurunan meritokrasi. Dia menjanjikan kepada para pendukungnya penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta peningkatan hukuman untuk klaim palsu mengenai kejahatan seksual, sambil menganggap gerakan feminis seperti #MeToo dan kuota pekerjaan sebagai “seksisme terbalik.” Kepresidenan Yoon kemudian menunjukkan peningkatan reaksi terhadap kesetaraan gender di Korea Selatan. Alih-alih mempromosikan dan membantu gerakan feminisme di negaranya, Presiden Yoon Suk-yeol malah menghapus kuota gender pemerintah dan kini membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga yang selama ini telah membantu perempuan dan mendukung para korban pelecehan seksual. Keputusan yang dikritik telah merusak gerakan kesetaraan gender ini mendapatkan gelombang perlawanan dari para feminis di Korea Selatan, dengan lebih dari 800 organisasi menantang langkah tersebut. Keputusan mengenai Kementerian tersebut juga memicu kritik internasional. *The Washington Post* menyoroti bahwa lembaga tersebut telah berjasa dengan berfokus pada program yang mendukung kelompok-kelompok yang termarginalkan dan kurang terwakili, termasuk ibu tunggal, penyintas kejahatan seksual, pekerja perempuan, dan perempuan migran. Berkat upaya dan dorongan dari aktivis perempuan, tuntutan untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga tidak dimasukkan dalam revisi Undang - Undang Organisasi Pemerintah 1948 pada bulan Februari 2023 dan dalam kondisi tertunda (The Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development, 2023). Namun, sikap pemerintah tidak kunjung berubah dan masyarakat tidak bisa memastikan apakah akan ada upaya pemberantasan lainnya. Untuk itu, para aktivis perempuan, meningkatkan harapan untuk adanya pergerakan perempuan selanjutnya yang siap untuk menghadapi kendala-kendala ini. Partai perempuan pertama Korea Selatan, Women’s Party juga berharap bahwa perempuan di seluruh negara gingseng tersebut bisa menjadi representasi substantif dalam ruang-ruang pembuatan keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang gerakan feminis yang berusaha melawan ketidaksetaraan gender dan misogini yang merajalela di Korea Selatan muncul sebagai respons terhadap lonjakan anti-feminisme di negara tersebut. Hal ini menciptakan perang gender yang mendesak masyarakat untuk membahas hak-hak perempuan, yang sebelumnya dianggap sebagai topik tabu. Laki-laki dalam masyarakat mengklaim bahwa mereka merasa ditindas. Lingkaran setan ini berdampak negatif pada kemajuan gerakan feminis di Korea Selatan, karena rantai kebencian yang ditujukan kepada feminis membuat banyak orang enggan mendukung gerakan ini. Para laki-laki merasa defensif dan merasa didiskriminasi oleh gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi para aktivis dan akademis feminisme untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan, dengan stereotip dan stigma buruk mengenai feminis.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menjabarkan dan menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi pada langgengnya sistem patriarki yang telah mengakar kuat, serta memperlambat kemajuan gerakan feminis di Korea Selatan. Sebagai sebuah negara yang tengah mengalami transisi pembangunan yang sangat pesat dan signifikan, para perempuan di Korea Selatan masih harus menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender yang sejatinya masih tertinggal jauh di belakang. Meskipun kemajuan dalam sektor industri dan ekonomi telah diperoleh, perkembangan tersebut tidak disertai dengan kemajuan yang sebanding dalam hal kesejahteraan dan keamanan hidup para perempuan. Hal ini terjadi karena adanya nilai-nilai kultural dan struktural yang masih sangat patriarki di Korea Selatan, yang pada gilirannya mengakibatkan terjebaknya seluruh perempuan di negara tersebut dalam peran-peran yang sangat dipengaruhi oleh gender, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi mereka sehari-hari.

Lebih lanjut, mereka dibebani dengan ekspektasi dan tuntutan keluarga yang menuntut mereka untuk memenuhi peran-peran tertentu, yang sering kali membatasi kebebasan dan potensi mereka. Pengaruh nilai-nilai Konfusianisme yang dipegang erat oleh masyarakat Korea Selatan inilah yang merupakan landasan kuat dari struktur patriarki mereka. Ditambah lagi, konsep tentang peran gender tradisional, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas utama sementara perempuan diharapkan memenuhi peran domestik, masih kuat dalam budaya Korea Selatan. Nilai-nilai Konfusianisme, yang menekankan hierarki dalam keluarga dan pentingnya kesucian keluarga, menciptakan tantangan bagi perempuan yang berusaha keluar dari norma-norma tersebut. Terutama, pembatasan historis terhadap pendidikan perempuan dan pemahaman yang kental akan peran tradisional perempuan dalam keluarga adalah warisan dari nilai-nilai Konfusianisme yang masih terasa hingga kini.

Di samping itu, perkembangan Konfusianisme, yakni Neo-Konfusianisme, memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan konstitusional Korea Selatan (*Daehanmingug heonbeop*). Seiring waktu, Konfusianisme berkembang menjadi agama virtual di negara tersebut, dengan Neo-Konfusianisme menjadi ideologi mayoritas yang memengaruhi masyarakat dan pemerintah. Pengaruh ini terlihat dalam penekanan pada ritus leluhur dan harta silsilah yang membentuk identitas dan tradisi hukum Korea Selatan. Meskipun terjadi perubahan signifikan pada awal abad ke-20 dengan pengaruh Barat, nilai-nilai Neo-Konfusianisme masih memainkan peran dalam sistem hukum dan politik modern Korea Selatan, mencerminkan hubungan erat antara Konfusianisme dan politik di negara tersebut. Di sisi lain, faktor geopolitik antara Korea Selatan dan Korea Utara, memberikan tekanan tambahan pada dinamika gender dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan wajib militer untuk laki-laki di Korea Selatan menjadi salah satu faktor yang memperkuat norma-norma maskulinitas tradisional. Peran laki-laki dalam pertahanan negara diinterpretasikan sebagai pemenuhan tugas maskulinitas, sementara peran perempuan lebih sering terkait dengan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang melekat dalam struktur wajib militer dan menyulitkan perjuangan gerakan feminis untuk merubah persepsi masyarakat terhadap peran gender.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Konfusianisme dengan dinamika konteks sejarah, budaya, dan politiknya, memiliki dampak substansial terhadap stagnasi gerakan feminis di negara Korea Selatan. Nilai konfusianisme yang sejak lama telah menjadi ideologi mayoritas masyarakat di Korea Selatan tidak bisa lepas dari sendi-sendi norma dan juga nilai mereka. Dengan konfusianisme yang menegaskan adanya keluarga patriarki besar, di mana ayah dan anggota laki-laki memiliki status lebih tinggi daripada ibu, anggota yang lebih muda, dan anggota perempuan, membangun keterbatasan bagi perempuan untuk bisa keluar dari peran gender yang telah ditetapkan oleh Konfusianisme. Selain itu, terdapat penolakan terhadap gerakan feminisme di Korea Selatan akibat kendala budaya dan politik. Gerakan feminisme di negara tersebut masih menghadapi resistensi yang signifikan. Upaya penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga oleh Presiden Yoon Seok-Yeol juga menunjukkan dukungan pemerintah kepada kelompok anti-feminisme dan menghambat pergerakan kesetaraan gender di Korea Selatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kelompok di masyarakat memang masih enggan menerima perubahan dalam norma-norma gender tradisional. Ditambah lagi gerakan feminisme juga dihadapkan pada stereotip dan stigma terkait dengan label feminisme radikal atau supremasi wanita. Melalui argumen-argumen tersebutlah penulis menemukan kesimpulan bahwa gerakan feminis di Korea Selatan memiliki kesulitan yang signifikan dalam mencapai kemajuan yang lebih lanjut. Meskipun demikian, gerakan feminis yang sedang berlangsung seperti gerakan 4B mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan penolakan terhadap kendala budaya dan politik, menunjukkan adanya potensi perubahan sikap dan norma masyarakat di

masa depan. Dengan demikian, penting untuk terus melakukan studi dan menggali hubungan antara nilai-nilai Konfusian dan isu-isu gender saat ini guna mencari solusi yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan di Korea Selatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development. (2023). South Korea. – 34 years of advocacy, activism and movement building to advance women’s human rights and Development Justice. [https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/09/South-Korea\\_KNOW.pdf](https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/09/South-Korea_KNOW.pdf)
- Ahn, A. (2022, December 3). Feminists are protesting against the wave of anti-feminism that’s swept South Korea. *NPR*. <https://www.npr.org/2022/12/03/1135162927/women-feminism-south-korea-sexism-protest-haeil-yoon>
- Ali, I. (2023). Feminist Theorizing in the International Relations Discipline. *Journal of International Women’s Studies*, 25(2), 13. <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol25/iss2/13/>
- Berling, J. (2023). Confucianism. Asia Society. <https://asiasociety.org/education/confucianism>
- Chen, Y. (2021). The Presence of Confucianism in Korea and its General Influence on Law and Politics. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Cho, M. (2018). The Problem of Sovereign Succession in Confucian Ritual Discourse: Constitutional Thought of Reconciliation between Fact and Value. *Korean Studies*, 42, 41–63. <https://www.jstor.org/stable/26798791>
- Creswell, J. W., & Poth, C. (2017). *Qualitative Inquiry and research design: choosing among five approaches*. [https://openlibrary.org/books/OL28633749M/Qualitative\\_Inquiry\\_and\\_Research\\_Design](https://openlibrary.org/books/OL28633749M/Qualitative_Inquiry_and_Research_Design)
- Grady, C. (2018, July 20). The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained. *Vox*. <https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth>
- Haeryun, K. (2022, December 4). *Despite stark gender inequality in South Korea, hostility to feminism is growing*. NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/stark-gender-inequality-south-korea-hostility-feminism-growing-rcna59747>
- Jung, K. (2013). *Practicing feminism in South Korea: The women’s movement against sexual violence*. Routledge.
- Kim, K., & Oh, S. (1998). *The Increase of Educational Opportunity in Korea under the Japanese Occupation: For Whom the Bell Told?* <https://hdl.handle.net/10371/72664>
- Kim, M. S. (2020). Rites and Rights: Lineage Property and Law in Korea. *L’Atelier Du CRH*, 22. <https://doi.org/10.4000/acrh.11667>
- Kim, S. (Ed.). (2015). *Confucianism, Law, and Democracy in Contemporary Korea*. Rowman & Littlefield International, Limited.
- Koeval, H. (2022, April 7). *Cultural Confinement: Challenges to South Korean feminism*. Carolina Digital Repository. [https://cdr.lib.unc.edu/concern/honors\\_theses/q237j264v](https://cdr.lib.unc.edu/concern/honors_theses/q237j264v)
- KoreaTimes. (2021, September 6). *Secure society for women*. koreatimes. [https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2023/12/137\\_315104.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2023/12/137_315104.html)
- Koh, E. (2008). Gender issues and confucian scriptures: Is confucianism incompatible with gender equality in South Korea? *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 71(2), 345–362. <https://doi.org/10.1017/s0041977x08000578>
- Lenthe Van, P. (2022). *Riding the Anti-Feminist Wave: Dividing a Country for Political Gain*. Student theses at Leiden University | Student Repository. <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A3304642/view>
- Lesso, R. (2023, September 21). *What are the four waves of feminism?* TheCollector. <https://www.thecollector.com/what-are-the-four-waves-of-feminism/>
- MUCH. (2023). *The Constitution of the Republic of Korea*. National Museum Of Korean Contemporary History. [https://www.much.go.kr/en/contents.do?cid=03\\_14&fid=03](https://www.much.go.kr/en/contents.do?cid=03_14&fid=03)

- Mackenzie, J. (2022, Dec 14). As South Korea abolishes its gender ministry, women fight back. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-63905490>
- Rampton, M. (2022, June 30). *Four Waves of Feminism*. Pacific University. <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>
- Rosenlee, L.-H.L.. (2006). Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation. *Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation*. 1-200.
- Sleziak, T. (2013). The role of confucianism in contemporary South Korean society. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/publication/272389562\\_The\\_Role\\_of\\_Confucianism\\_in\\_Contemporary\\_South\\_Korean\\_Society](https://www.researchgate.net/publication/272389562_The_Role_of_Confucianism_in_Contemporary_South_Korean_Society)
- Smith, S. (2018, August 19). *Introducing Feminism in International Relations Theory*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>
- Sussman, A. L. (2023, March 8). A world without men. *The Cut*. <https://www.thecut.com/2023/03/4b-movement-feminism-south-korea.html>
- Teehan, K. (2023, November 2). *South Korea's Feminist 4B Movement: An explainer*. Service95. <https://www.service95.com/4b-movement-explainer/>
- Tizzard, D. (2022, October 29). Korean feminism: Biology matters. *The Korea Times*. <https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.amp.asp?newsIdx=338806>
- Trifoso, C. (2023). An Examination of Women's Rights in South Korea: From "New Women" to Female Idols. *Senior Theses*. <https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2022.hist.st.06>
- True, J. (2010). Feminism and Gender Studies in International Relations Theory. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.46>
- Weiming, T. (2023, November 6). *Confucianism | Meaning, History, Beliefs, & Facts*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Confucianism>
- Wool, J. H. (2023). *A new variation of modern prejudice: young Korean men's anti-feminism and male-victim ideology*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1230577>
- World Bank. (2024, April). *Republic of Korea, Overview*. <https://www.worldbank.org/en/country/korea>
- Yoon, T. (2019). South Korea: More than Just the "Beauty-Obsessed" Capital of the World. *The Art of the Op-Ed*, 1(1). <https://journals.library.columbia.edu/index.php/oped/article/view/1927>

## **BIOGRAFI**

**Siti Sarah Humairah**, is a student of the International Study Program, Faculty of Social and Political Sciences at Padjadjaran University, class of 2021. She has a keen interest in the cultural and geopolitical studies of South Korea.

**Anggia Utami Dewi**, is a full-time faculty member at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Her research interests include higher education and knowledge studies, globalization studies, and international migration.